



## PENTINGNYA KUALITAS INFORMASI INTERNAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Heranantio Anggoro Putra  
Moh Didik Ardiyanto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the influence of Internal Information Quality of an enterprise on tax avoidance planning and tax risk reduction on an enterprise.*

*The population in this study consists of mining companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2014 period. Method of collecting data in this research is purposive sampling. After doing sampling stage and data tabulation, achieved 18 companies for 4 years of financial statement period that eligible for the further observation. Hypothesis examinations are using multiple regression analyze and regression analyze using Moderated Regression Analysis (MRA) for the moderating variable on SPSS20.*

*The empirical result of this study shows that Internal Information Quality isn't influencing tax avoidance. Even it was moderated by improved coordination and reduced uncertainty variables. But, this study shows that higher Internal Information Quality influencing the lower tax risk*

**Keywords :** *internal information quality, tax avoidance, tax risk*

### PENDAHULUAN

Setiap warga negara, pasti akan dikenakan beban pajak atas kegiatan yang dilakukan. Warga negara yang baik harus membayar pajak tepat pada waktu dan jumlah yang ditentukan. Sesuai dengan pengertian pajak sendiri menurut Undang Undang KUP pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah

---

<sup>1</sup> *Corresponding author*

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ( Mardiasmo, 2006:7 ). Sehingga, Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya hanya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Penghitungan pajak ( dalam hal ini pajak penghasilan ) dilakukan atas dasar harta/kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh masing-masing orang pribadi atau badan, sehingga antara wajib pajak satu dengan yang lain memiliki tingkat pembayaran pajak yang berbeda meski dengan penghitungan yang sama. Atas dasar ini, beberapa wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan beban investasi. Terutama dengan wajib pajak dengan penghasilan besar, seperti perusahaan/pengusaha.

Bagi Perusahaan sendiri, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith and Skousen, 1987). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (tingkat ROA). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan memengaruhi kebijakan pembaian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun per 31 Desember 2013. Jumlah itu hanya 96% dari target Dirjen Pajak tahun 2014. Belum maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak tersebut mungkin dikarenakan wajib pajak/perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban pajak mereka lebih kecil. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, wajar apabila perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajak yang wajib dibayarkan. Maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membayar pajak sekecil mungkin agar laba bersih perusahaan tetap pada target perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak adalah dengan melakukan Penghindaran Pajak/Penghindaran Pajak/ Tax Avoidance.

Tax Avoidance Sendiri atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagoal, 2007). Hal ini sangat berkaitan dengan Teori etika yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) yaitu sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan prinsip kewajiban yang relevan. Apakah dalam melakukan aktivitas perpajakannya, perusahaan masih memiliki etika atau tidak. Tax Avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih



memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (Arnold and McIntyre, 2005). Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang efektif agar dapat menghindari beban pajak secara maksimal. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di US) merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Dengan melakukan teknik-teknik/strategi tertentu, suatu perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak tanpa terlihat bersalah di mata hukum. Penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin / eksekutif perusahaan itu sendiri yang selanjutnya akan dilakukan oleh seluruh ornamen perusahaan tersebut. Seperti konsep teori perencanaan pajak yang diungkapkan oleh Hoffman (1961) bahwa Perencanaan pajak adalah kapasitas wajib pajak untuk mendapatkan traif pajak se minimal mungkin. Dalam hal ini, strategi/kebijakan/keputusan yang diambil oleh pihak eksekutif perusahaan dalam rangka melakukan Tax Avoidance sangatlah dipengaruhi oleh Lingkungan Internal perusahaan itu sendiri. Mulai dari Manajemen tingkat atas sampai Manajemen tingkat bawah. Perusahaan pusat ataupun cabang. Sehingga, Kualitas Informasi Internal Perusahaan sangat berperan penting bagi Perusahaan dalam melakukan Tax Avoidance atau penghindaran pajak.

Informasi Internal adalah informasi yang dipakai oleh pihak yang berada dalam organisasi mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya. Sedangkan Lingkungan informasi yang dimaksud adalah interaksi antara manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah dalam mendistribusikan informasi internal. Jadi Kualitas Informasi Internal adalah apakah arus informasi yang terjadi didalam perusahaan itu memiliki koordinasi yang baik sehingga informasi yang dihasilkan akan menjadi informasi yang berguna, akurat, serta dapat diandalkan.

Menurut bebrapa penelitian, Kualitas Informasi Internal yang baik mampu membantu perusahaan dalam menghindari pajak serta perusahaan yang memiliki kualitas informasi internal yang baik pasti memiliki Tarif Pajak Efektif ( ETR ) yang rendah. Dampak dari Kualitas Informasi Internal lebih kuat pada perusahaan yang sangat mengandalkan lingkungan informasi dalam operasionalnya. Seperti pada perusahaan besar yang memiliki cabang tersebar di beberapa daerah, sangat membutuhkan lingkungan informasi internal yang berkualitas agar operasionalnya tetap berjalan sesuai dengan rencana. Demikian pula dalam melakukan penghindaran pajak, apabila dalam perusahaan tersebut kualitas koordinasi dantara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya baik, maka peluang dan besarnya pajak yang terelakkan akan semakin besar pula.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Perencanaan Pajak**

Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Hoffman (1961), Perencanaan Pajak adalah kapasitas wajib pajak untuk menyusun laporan keuangannya sendiri sebaik mungkin agar mendapat tarif pajak yang minimal. Sedangkan menurut Jeff Pniowsky (2010) perencanaan pajak adalah proses menstruktur suatu masalah dalam rangka menunda, mengurangi, atau menghilangkan jumlah utang pajak kepada pemerintah.

Teori Perencanaan Pajak menurut Hoffman (1961) mengenalkan prinsip dan konsep yang dapat dipraktikan oleh para wajib pajak. Perencanaan Pajak sendiri tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang, maksudnya, strategi yang sama tidak bisa diterapkan terus menerus dalam melakukan perencanaan pajak.

Scholes-Wolfson (2008) menjelaskan mengenai kerangka kerja yang ia buat mengenai perencanaan pajak memiliki 3 prinsip signifikan, yaitu :

1. Pendekatan Multilateral

Atasan dan Bawahan memiliki kedudukan yang sama dalam pengenaan pajak.

2. Pentingnya Pajak yang Tidak Terlihat

Semua Pajak yang masuk dalam struktur perencanaan pajak haruslah pajak dalam skala yang luas. Baik pajak yang secara eksplisit maupun pajak yang implisit, semua harus diperhatikan, karena riskan terjadi pajak yang tidak terlihat lupa untuk diorganisir sehingga timbul kecurigaan atau kesalahan penghitungan pajak.

3. Pentingnya Biaya non-pajak

Semua biaya harus dapat menjelaskan perbedaan antara insentif manajemen dan trade-off, dan biaya transaksi antara target akuntansi keuangan perusahaan dan target pajak.

### **Teori Etika**

Immanuel Kant (1724-1804) mencetuskan teori etika deontologis, yaitu teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan. Ia berpendapat lagi bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak.

Secara etimologi, Etika berasal dari kata "Ethos" dalam bahasa Yunani yang berarti watak atau kebiasaan. Etika sendiri biasanya berhubungan erat dengan moral, diambil dari kata dalam bahasa Yunani juga yaitu "moralis" yang berarti melakukan perbuatan baik/positif. Menurut Maryani dan Ludigdo (2001), Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.

### **Pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap penghindaran pajak**

Literatur Manajemen Akuntansi berpendapat bahwa Kualitas Informasi Internal yang tinggi akan menyebabkan peningkatan pembuatan keputusan manajerial (Horngren, 2012). Kualitas Informasi Internal yang tinggi meningkatkan pembuatan keputusan dengan menyediakan manajemen informasi nyata tentang kondisi finansial perusahaan dan dengan mengeliminasi penghalang antara siklus akuntansi (Brazel dan Dang, 2008). Sesuai dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Hoffman (1961) bahwa Perencanaan Pajak adalah kapasitas wajib pajak untuk menyusun laporan keuangannya sendiri sebaik mungkin agar mendapat tarif pajak yang minimal, sehingga

manajerial akan mengolah informasi sebaik mungkin agar menciptakan tarif pajak seminimal mungkin.

Selagi Kualitas Informasi Internal yang tinggi memiliki dampak positif terhadap pembuatan keputusan manajerial, fokus dari penelitian ini ditekankan pada kemampuan Kualitas Informasi Internal meningkatkan keputusan yang berkaitan dengan pajak. Perusahaan dengan Kualitas Informasi Internal yang tinggi berada di posisi yang lebih baik untuk berurusan lebih efektif terhadap proses dokumentasi pajak dan secara lebih mudah mengidentifikasi transaksi yang menghasilkan keuntungan pajak.

*H1 : Kualitas Informasi Internal yang tinggi berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang tinggi*

### **Pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh peningkatan koordinasi**

Kesenjangan Informasi Substansial dapat timbul diantara bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan ( dengan informasi spesifik yang lebih memungkinkan untuk sebagian unit bisnis ) dan antara tingkatan manajemen ( Bushman, 1995 ). Sebagai contoh, interjurisdisional pengalihan pendapatan dari perusahaan dengan operasi yang tersebar bisa menghasilkan penghematan pajak yang signifikan ( Maydew, 2011 ). Masalah kesenjangan informasi yang timbul karena operasi tersebar dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas informasi internal perusahaan, dimana dapat mengurangi kesenjangan informasi tidak hanya diantara sesama unit bisnis tapi juga antara dinas perpajakan dengan unit bisnis. Kualitas Informasi Internal dapat membantu mengidentifikasi kesempatan penghindaran pajak dalam yurisdiksi yang bermacam dan dapat mengurangi biaya pemenuhan dan dokumentasi diseluruh unit bisnis.

Hal ini berhubungan dengan prinsip mengenai teori perencanaan menurut Scholes-Wolfson (2008) mengenai pentingnya pajak tidak terlihat. Dimana dalam melakukan perencanaan pajak, diharuskan semua komponen pajak terlibat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Peningkatan Koordinasi sangat diperlukan dalam hal ini karena dengan adanya koordinasi antara satu sama lain unit bisnis atau bahkan unit geografis, dokumentasi perpajakan akan lebih explicit dan bisa terekam dengan baik. Maka dari itu, jurnal ini berharap untuk bisa melihat efek Kualitas Informasi Internal pada penghindaran pajak yang lebih besar pada perusahaan yang mengalami keuntungan lebih dari perusahaan yang memiliki peningkatan koordinasi.

*H2 : Peningkatan Koordinasi memperkuat hubungan antara kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak*

### **Pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh pengurangan ketidakpastian**

Ketidakpastian didalam perusahaan menghalangi kemampuan manager untuk membuat keputusan. Galbraith mengindikasikan bahwa ketika ada ketidakpastian yang besar, informasi lebih harus diproses oleh pembuat keputusan selama melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai performa yang diinginkan. Cara yang mana perusahaan dapat berurusan dengan ketidakpastian adalah dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk memproses informasi dengan menginvestasikan sistem informasi internal. ( Galbraith, 1974 ).

(Chenhall dan Morris, 1986), Terdapat survey yang membuktikan bahwa kesadaran terhadap manfaat akan informasi lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki lingkungan tidak pasti. Hal ini sehubungan dengan prinsip pertama dari teori perencanaan pajak oleh Scholes-Wolfson (2008) yaitu pendekatan multilateral. Pendekatan multilateral yang

dimaksud adalah hubungan antara atasan dan bawahan, serta struktur organisasi yang terlibat dalam proses perencanaan pajak. Pengurangan Ketidakpastian memfasilitasi pendekatan multilateral tersebut. Dengan memberikan kepastian informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam perusahaan, manajerial dapat membuat keputusan perpajakan dengan baik.

*H3: Pengurangan Ketidakpastian memperkuat hubungan antara kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak*

#### **Pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap risiko pajak**

(Hanlon dan Heitzman, 2010) Diskusi tentang kesulitan konsep menentukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak dan gagasan dengan derajat agresivitas dimata orang yang bersangkutan. Jurnal ini berspekulasi bahwa perusahaan dengan Kualitas Informasi Internal yang tinggi memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap pemasukan informasi. (Chenhall, 2008), informasi yang lebih baik untuk pembuatan keputusan pajak, dan kemampuan dokumentasi yang lebih baik vis-a-vis dengan kewenangan perpajakan. Sesuai dengan teori perencanaan pajak menurut Fallen, Hammervord, dan Gronhaug (1995) Perencanaan Pajak diidentifikasi menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi beban pajak berdasarkan pedoman hukum. Apabila perencanaan tersebut dilakukan masih dalam ranah tidak melanggar hukum maka risiko pajak tidaklah besar.

Hal ini dipengaruhi juga oleh teori etika yang dirumuskan oleh Imanuel Kant (1724-1804) yaitu teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan. Ia berpendapat lagi bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Hal ini menentukan keputusan manajerial dalam melakukan penghindaran pajak. Karena Penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan, namun tindakan tersebut juga tidak mematuhi aturan juga.

Manajerial hal ini memanfaatkan pengolahan kualitas informasi agar perencanaan pajaknya tetap pada garis yang tidak melanggar moral, dan menimbulkan risiko. Demikian, Perusahaan dengan Kualitas Informasi Internal yang tinggi dapat mencapai ETR yang lebih rendah, dimana memiliki risiko pajak yang rendah pula.

*H4: Kualitas Informasi Internal yang tinggi berpengaruh terhadap risiko pajak yang lebih rendah.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen**

Variabel Dependen yang pertama dari penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Dalam penjelasan Undang Undang tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembanunan. Namun bagi pelaku bisnis, pajak dianggap sebagai beban investasi, sehingga wajar bagi perusahaan-perusahaan berusaha untuk menghindari pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. (Arnold dan McIntyrem 1995) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran/pengjematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan.

Variabel Dependen yang kedua dalam penelitian ini adalah risiko pajak. (Hanlon dan Heitzman, 2010) diskusi tentang kesulitan konsep menentukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak dan gagasan yang derajat keagresivannya ada dimata orang yang bersangkutan. (Chenhall, 2008) perusahaan dengan kualitas informasi internal yang tinggi memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi pula dalam pemberian informasi

#### **Variabel Independen**

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Internal. Literatur Manajemen Akuntansi sudah lama berpendapat bahwa Kualitas Informasi Internal yang tinggi mengarah pada peningkatan pembuatan keputusan manajerial (Horngren et al, 2012). Sementara Kualitas Informasi Internal yang tinggi memiliki dampak positif terhadap setiap pembuatan keputusan manajerial, fokus dari jurnal ini adalah pada kemampuan kualitas informasi internal meningkatkan kualitas keputusan yang berhubungan dengan pajak. Jurnal ini berpendapat bahwa kemampuan perusahaan untuk secara efektif menghindari pajak ditingkatkan dengan tingginya lingkungan kualitas informasi internal yang membuat akuisisi dan integrasi informasi lebih mudah.

#### **Variabel Moderasi**

Variabel moderasi pertama dalam penelitian ini adalah dispersi geografik. Perusahaan dengan tingkat persebaran operasi yang tinggi tidak hanya menghadapi masalah asimetri informasi yang penting, tetapi juga keuntungan potensial dari kesempatan perencanaan pajak. (Maydew, 2011) menyontohkan Interjurisdisional peralihan pendapatan untuk perusahaan yang operasinya tersebar secara geografis dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam penelitian ini, Dispersi Geografik digunakan untuk mengukur kebutuhan koordinasi, yang dihitung, sesuai dengan (Bushman et al, 2004), dengan menjumlahkan kuadrat rasio dari penjualan perusahaan disetiap segmen geografik dibagi total penjualan perusahaan. Lambang dari Dispersi Geografik sendiri adalah *Geographic Dispersion*.

Variabel moderasi kedua adalah restrukturisasi. Selama restrukturisasi, perusahaan mengalami waktu peningkatan ketidakpastian dengan perubahan operasional yang signifikan (Morton dan Neill, 2001). (Lin dan yang, 2006) mengemukakan bahwa hasil restrukturisasi pada perubahan yang fundamental pada sistem, strategi, operasi dan menimbulkan ketidakpastian di segala aspek organisasi, menambah suara pada lingkungan informasinya Restrukturisasi dilambangkan dengan *Restructure*. Cara menghitung restrukturisasi adalah Variabel Indikator sama dengan satu (1) apabila perusahaan melaporkan beban restrukturisasi pada tahun fiskal berjalan. Dan nol (0) apabila tidak.

#### **Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2011, 2012, 2013, dan 2014. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dari populasi yang berdasarkan kriteria yang dikehendaki peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, (2) Memiliki laporan keuangan lengkap yang telah di audit dari tahun 2011-2014, (3) Perusahaan tidak delisting dari tahun 2011-2014, (4) Memiliki seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian

#### **Metode Analisis**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik analisis data. Adapun teknik-teknik analisis data tersebut adalah :

1. Analisis statistik deskriptif
2. Uji asumsi klasik

- a. Uji multikolinieritas
  - b. Uji autokorelasi
  - c. Uji heteroskedastisitas
  - d. Uji normalitas
3. Analisis regresi
    - a. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )
    - b. Uji signifikansi simultan (uji-F)
    - c. Uji signifikansi parsial (uji-T)
  4. Pengujian hipotesis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh populasi perusahaan sebanyak 41, namun berdasarkan kriteria sampel di atas maka disimpulkan dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 172.

**Tabel 1**  
**Perincian Perolehan Sampel**

No.	Data	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI 2011-2014 (41 perusahaan)	<b>164</b>
2.	Perusahaan yang delisting ( 3 perusahaan )	<b>(12)</b>
3.	Perusahaan yang tidak menyediakan informasi yg dibutuhkan(20 perusahaan)	<b>(80)</b>
4.	Data <i>outlier</i>	<b>0</b>
<b>Total Jumlah Sampel</b>		<b>163</b>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

### Deskripsi Variabel

**Tabel 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	SD	Min.	Maks.
KII	72	-0,2556	0,0804	-0,6466	-0,1397
TA	72	0,3839	0,1905	0,095	0,8812
TR	72	0,1073	0,0923	0,014	0,3163
DG	72	0,4652	0,1932	0,0385	0,8001
Restruktur	72	0,4444	0,5003	0	1
LEV	72	12,8486	0,7736	11,0717	14,0211
SIZE	72	0,223	0,1816	0,0038	0,6835

Sumber : Output analisis deskriptif data dari SPSS, 2016

Berdasarkan tabel diatas, telah dijelaskan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah total data observasi penelitian (N) adalah sebanyak 72. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel KII ( Kualitas Informasi Internal )

yang diukur dengan cara membagi jumlah hari dari hari pertama tahun fiskal dimulai sampai hari diumumkannya laporan keuangan ke BEI dibagi dengan jumlah hari di 1 tahun fiskal, memiliki nilai tertinggi -0,1397 oleh perusahaan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. (ITMG) tahun 2014 dan nilai terendah -0,6466 yaitu perusahaan Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) pada tahun 2014. Variabel KII ( Kualitas Informasi Internal ) ini sendiri memiliki rata-rata pada nilai -0,2556 dan Standar Deviasi 0,0804.

Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan Cash ETR atau Tarif Pajak Efektif. Cash ETR merupakan jumlah dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Berdasarkan data, Tax Avoidance terbesar dimiliki oleh Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) tahun 2014 pada angka 0,8812 dan nilai terendahnya pada angka 0,095 oleh perusahaan Bumi Resource (BUMI) tahun 2012. Nilai rata-rata variabel tax avoidance adalah 0,3839 dengan Deviasi Standard 0,1905.

Variabel Task Risk atau Risiko Pajak diperoleh melalui penghitungan volatilitas Cash ETR. Volatilitas Cash ETR sendiri dihitung dengan Deviasi Standard dari Cash ETR selama 3 tahun berakhir pada tahun t. Berdasarkan penghitungan oleh data, Variabel Task Risk memiliki nilai maksimum yaitu 0,3163 oleh Bumi Resource (BUMI) pada tahun 2013, dan nilai minimum yaitu 0,014 oleh Atlas Resource (ARII) pada tahun 2011. Nilai rata-rata dan Deviasi Standard dari variabel task risk adalah 0,1073 dan 0,0923.

Peningkatan Koordinasi merupakan variabel moderat dalam penelitian ini, dimana pengukurannya adalah dengan Dispersi Geografis. Dispersi Geografis dihitung dengan cara Menjumlahkan kuadrat dari tiap penjualan pada segmen geografi dibagi dengan total penjualan lalu dikurangi 1 (satu), kemudian dikali dengan negatif satu (-1). Dilihat dari tabel data, nilai tertinggi untuk variabel peningkatan koordinasi adalah 0,8001 oleh perusahaan Adaro Energy Tbk. (ADRO) pada tahun 2013 dan nilai terendah adalah 0,0385 oleh perusahaan Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI) pada tahun 2011.

Variabel moderat lainnya dalam penelitian ini adalah pengurangan ketidakpastian yang diukur dengan ada atau tidaknya beban restrukturisasi pada laporan keuangan perusahaan terkait. Pengukuran sendiri menggunakan DUMMY yaitu satu (1) apabila perusahaan melaporkan adanya beban restrukturisasi dan nol (0) apabila tidak. Data menunjukkan nilai maksimum 1 dan minimum 0. Dan rata-rata sendiri adalah 0,4444 dan Deviasi Standard 0,5003.

Terdapat 2 variabel kontrol dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Leverage atau Penggunaan utang untuk membiayai investasi. Cara menghitung Leverage sendiri adalah dengan menggunakan rasio atau perbandingan antara Total Utang Jangka Panjang dengan Total Aset. Dari perhitungan dengan cara tersebut, terdapat nilai maksimum dari data adalah 14,0211 yaitu perusahaan BUMI Resource (BUMI) tahun 2011 dan nilai minimumnya 11,0717 yaitu perusahaan Mitra Investindo (MITI). Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 12,8486 dan Deviasi Standard 0,7736.

Variabel kontrol yang kedua adalah Size atau ukuran perusahaan. Cara menghitung Size adalah dengan men-log total aset. Dari data dapat disimpulkan bahwa Size memiliki nilai terbesar pada angka 0,6835 yaitu perusahaan Atlas Resources Tbk. (ARII) tahun 2014 dan yang terendah pada angka 0,6835 yaitu perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) tahun 2011.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengujian hasil asumsi klasik pada setiap hipotesis, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji multikolinieritas dengan nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF dibawah 10 untuk semua variabel bebas, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dengan hasil signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel bebas, dan uji normalitas dengan menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov*, yang ada di atas tingkat signifikansi 0,05 untuk residual model regresinya. Pengujian model regresi dilakukan per hipotesis, dikarenakan tiap hipotesis dalam penelitian ini memiliki hubungan yang berbeda.

**Tabel 3**  
**Uji Statistik t**  
**Hipotesis 1**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,110	,413		,266	,791
	EA_KII	-,101	,271	-,043	-,372	,711
	Size	,014	,033	,056	,421	,675
	Leverage	,324	,139	,309	2,330	,023

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Output regresi berganda dari SPSS, 2016

**Tabel 4**  
**Uji Statistik t**  
**Hipotesis II**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,501	,462		1,084	,282
	EA_KII	,317	,825	,134	,385	,702
	Size	-,018	,035	-,071	-,495	,622
	Leverage	,277	,138	,264	2,002	,049
	Peningkatan Koordinasi	,057	,388	,058	,147	,883
	KII*DG	-,856	1,402	-,300	-,611	,543

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Output regresi berganda dari SPSS, 2016

**Tabel 5**  
**Uji Statistik t**  
**Hipotesis III**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,094	,523		-,181	,857
	EA_KII	-,780	,845	-,330	-,923	,359
	Size	,018	,035	,075	,532	,597
	Leverage	,388	,166	,370	2,332	,023
	Pengurangan Ketidakpastian	,079	,231	,206	,341	,734
	KII*Restruktur	,615	,921	,518	,668	,507

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Output regresi berganda dari SPSS, 2016

**Tabel 6**  
**Uji Statistik t**  
**Hipotesis IV**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,055	2,020		-,522	,603
	EA_KII	-2,900	1,323	-,244	-2,191	,032
	Size	-,213	,159	-,173	-1,339	,185
	Leverage	1,822	,681	,346	2,677	,009

a. Dependent Variable: Risiko Pajak

Sumber : Output regresi berganda dari SPSS, 2016

Dari hasil perhitungan pada tabel 3 untuk hipotesis 1, maka dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) variabel bebas tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel; EA\_KII (X1) dan Size (X2); dan 1 (satu) variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel Leverage (X3). Dari ketiga variabel bebas yang secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, dapat diketahui bahwa variabel leverage (X3) merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel penghindaran pajak.

Sedangkan untuk tabel 4 (hipotesis 2) dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) variabel bebas tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel; EA\_KII (X1), Size (X2); Peningkatan Koordinasi (X4) dan EA\_KII \* Peningkatan Koordinasi (X5) serta 1 (satu) variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel Leverage (X3). Dari kelima variabel bebas yang secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, dapat diketahui bahwa variabel leverage (X3) merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel penghindaran pajak, yaitu dengan kontribusi sebesar 26,4 persen.

Untuk tabel 5 hipotesis 3, maka dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) variabel bebas tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel; EA\_KII (X1), Size (X2); Pengurangan Ketidakpastian (X4) dan EA\_KII \* Pengurangan Ketidakpastian (X5) serta 1 (satu) variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel Leverage (X3). Dari kelima variabel bebas yang secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, dapat diketahui bahwa variabel leverage (X3) merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel penghindaran pajak, yaitu dengan kontribusi sebesar 37 persen.

Dan untuk tabel 6 hipotesis 4, maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) variabel bebas tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, yaitu variabel Size (X2); dan 2 (dua) variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tingkat risiko pajak, yaitu variabel EA\_KII (X1) dan Leverage (X3). Dari ketiga variabel bebas yang secara simultan berpengaruh terhadap tingkat risiko pajak, dapat diketahui bahwa variabel leverage (X3) merupakan variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel risiko pajak, disusul variabel EA\_KII (X1) di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 24,4 persen.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kualitas Informasi Internal terhadap penghindaran pajak dan risiko pajak apabila menggunakan sampel perusahaan pertambangan Indonesia selama tahun 2011-2014 berturut-turut. Sampel tersebut sendiri diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis statistik regresi berganda, maka hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian Hipotesis satu (H1) menunjukkan bahwa kualitas informasi internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak mendukung hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa keduanya berhubungan positif.
2. Hasil pengujian Hipotesis dua (H2) menunjukkan bahwa kualitas informasi internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, namun variabel moderasi memiliki hubungan positif terhadap hubungan keduanya.
3. Hasil pengujian Hipotesis tiga (H3) menunjukkan bahwa kualitas informasi internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan juga variabel moderasi memiliki hubungan negatif terhadap hubungan keduanya. Hasil ini tidak mendukung hipotesis tiga (H3) yang menyatakan hubungan kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak berhubungan positif terlebih dimoderasi oleh peningkatan koordinasi
4. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini mendukung hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa kualitas informasi internal yang tinggi mempengaruhi risiko pajak yang rendah.

### Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan ataupun kelemahan yang terdiri dari:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan yang ada di Indonesia.
2. Jumlah Sampel pada pengamatan masih terbatas hanya sektor pertambangan.
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 4 tahun dimana masih kurang akurat dalam menentukan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel tidak terbatas hanya pada sektor pertambangan tapi bisa lebih merambah ke sektor lainnya.
2. Peneliti selanjutnya bisa juga mencari sumber-sumber data diluar Indonesia terutama Amerika, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang tidak dipublikasikan di Indonesia sehingga mengurangi keakuratan data.
3. Peneliti selanjutnya bisa menghilangkan hipotesis 3 dari hipotesis karena telah dilakukan berbagai pengujian dengan sampel dan metode berbeda, hipotesis tersebut tetap ditolak.

## REFERENSI

Carlos-Alberto Dorantes, C. L. (2013). The effect of enterprise systems implementation on the firm information environment.



- Desai, M. D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The review of economics and statistics*, 537-546.
- Dharmapala, M. A. (2005). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *NBER Working Paper*.
- Diaz Priantara, A. S. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dion, M. (2011). Are ethical theories relevant for ethical leadership. *Emerald Insight*.
- EBERT, R. W. (2006). *BISNIS edisi ke 8*. Erlangga.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, B. K. (2013). Internal Control and Operational Efficiency. *Working paper*.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hoque, M. A. (2004). Ethics and economic theory. *Emerald Insight*.
- Ismail, M. H. (2015). Corporate Tax Planning Activities : Overview of concepts, theories, restriction, motivation and approaches. *Mediterranean Journal of Social Science*.
- John Gallemore, E. L. (2015). the importance of internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 149-167.
- Kim, J.-B. L. (2011). Corporate Tax Avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 639-662.
- Liana, L. (2009). *Pengaruh MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen*. Semarang: Universitas Stikubank.
- Mahfoudh Hussein Mgamal, K. N. (2015). Corporate tax planning activities : Overview of Concepts, Theories, Restriction, Motivation, and Approaches. *Emerald Insight*.
- Noga, B. H. (2015). Auditor Provided Tax Services and long term tax avoidance. *Emerald Insight*.
- Prof. Dr. Gunadi, M. A. (2009). *Akuntansi Pajak*. Grasindo.
- Qiang Cheng, B. W. (2015). International Control and Operational Efficiency. *European Accounting Association Annual Congress*. Research Collection School of Accountancy.
- Rusydi, M. K. (2013). *Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap aggressive tax avoidance di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sari, T. K. (2013). Pengaruh ROA, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *ISSN 1410-4628*.
- Swartz, M. (2011). The Business Ethics of management theory. *emerald insight*.
- Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis : Pendekatan Filsafat Moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

